



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
Nomor : 163/SEK.PTA.W6-A/KU1.1.1/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
(PPABP) PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

- Membaca : Lampiran DIPA Petikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-005.01.2.402236/2026 tanggal 1 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026.
- Menimbang : a. Petikan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satua Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Tahun 2026 No. SP DIPA-005.01.2.402236/2026 dan No. SP DIPA-005.04.2.402237/2026, perlu ditunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
- c. Bahwa pegawai yang di tunjuk dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan yang berada di bawahnya;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Organisasi atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260/KMA/SK.KP5/XII/2024 tentang Penetapan Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja Pegawai.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) TAHUN ANGGARAN 2026.**
- KESATU : Mencabut Surat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang No. 2223 /SEK.PTA.W6-A/KU1.1.1/IX/2025 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk sdri. **PUTRI DIAN AMBARSARI, A.Md.** Nip. **199010222020122005**, Jabatan Arsiparis Terampil, Subbagian Keuangan dan Pelaporan sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2026;
- KETIGA : Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dalam hal Tugas, Pokok dan Fungsinya bertanggungjawab penuh kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Uraian Tugas yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan...

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Palembang disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
2. Pejabat Pembuat Komitmen PTA Palembang;
3. Pejabat Penanda Tangan SPM PTA Palembang;
4. Bendahara Pengeluaran PTA Palembang; dan
5. Staf Pengelola Keuangan.

Ditetapkan di Palembang
Pada, 02 Januari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,



Rahmat Supli

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PTA PALEMBANG
NOMOR : 163/SEK.PTA.W6-A/KU1.1.1/I/2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS
PENGELOLA ADMINISTRASI
BELANJA PEGAWAI (PPABP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALEMBANG TAHUN 2026

URAIAN TUGAS
PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)

1. Melakukan penatausahaan terkait pengelolaan keuangan untuk semua transaksi yang berkaitan dengan pembayaran belanja pegawai;
2. Melakukan penatausahaan terkait laporan serapan dan pengembalian anggaran;
3. Melakukan penatausahaan dan pengelolaan akuntansi instansi pemerintah;
4. Mendokumentasikan dan menyampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait laporan pertanggungjawaban atas realisasi anggaran.

Ditetapkan di Palembang
Pada 02 Januari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,



Rahmat Supli